Audited

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Alamat:

Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B Medan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Medan, 31 Desember 2024
KPA BPSIP Sumatera Utara,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPi.,MP.
NIP. 196902281996032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
I. Laporan Realisasi Anggaran
II. Neraca
III. Laporan Operasional
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
V. Catatan atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
B.2 Belanja
B.3. Belanja Pegawai
B.4. Belanja Barang
B.5. Belanja Modal
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
C.1. Aset Lancar
C.1.1. Persediaan
C.2. Aset Tetap
C.2.1. Tanah
C.2.2. Peralatan dan Mesin
C.2.3. Gedung dan Bangunan
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.2.5. Aset Tetap Lainnya
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C.3. Piutang Jangka Panjang
C.4. Aset Lainnya
C.4.1. Aset Tak Berwujud
C.4.2. Aset Lain-lain
C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
C.5. Kewajiban Jangka Pendek
C.6. Ekuitas
C.6.1. Ekuitas
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
D.2. Beban Pegawai
D.3. Beban Persediaan
D.4. Beban Barang dan Jasa
D.5. Beban Pemeliharaan
D.6. Beban Perjalanan Dinas
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
   E.1. Ekuitas Awal
   E.2. Surplus/Defisit-LO
   E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
      E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
      E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
   E.4. Transaksi Antar Entitas
      E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
      E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
   E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
   E.5. Ekuitas Akhir
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
   F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
   F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP Sumatera Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 31 Desember 2024
KPA BPSIP Sumatera Utara,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPi.,MP.
NIP. 196902281996032002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP Sumatera Utara Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp296,423,406 atau mencapai 128,32% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp231,007,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp10,142,207,059 atau mencapai 95,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp10,623,245,000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp244,114,842,991 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp579,058,375; Aset Tetap (neto) sebesar Rp243,145,160,144; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp207,714,392; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp182,910,080.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp244,114,842,991.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp204,692,906, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14,451,584,549 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp(14,246,891,643). Kegiatan Non Operasional defisit Rp(40,819,500) dan Pos-Pos Luar Biasa Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(14,287,711,143).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp248,087,850,481 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(14,287,711,143) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp(314,096,799) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9,845,783,653 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 244,114,842,991.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPSIP SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	231,007,000	296,423,406	128,32	259,701,518
Jumlah Pendapatan		**231,007,000**	**296,423,406**	**128,32**	**259,701,518**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	4,828,717,000	4,790,081,581	99,20	4,347,492,791
Belanja Barang	B.4.	5,794,528,000	5,352,125,478	92.37	4,462,068,073
Belanja Modal	B.5.	0	0	0	110,000,000
Jumlah Belanja		**10,623,245,000**	**10,142,207,059**	**95.47**	**8,919,560,864**

II. NERACA

BPSIP SUMATERA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	81,325,000	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	(406,625))	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.2.	80,918,375	0
Persediaan	C.1.3.	498,140,000	28,270,000
Jumlah Aset Lancar		**579,058,375**	**28,270,000**
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	185,776,503,000	185,776,503,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	24,468,450,464	24,468,450,464
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	61,721,073,685	61,721,073,685
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	9,201,190,543	9,201,190,543
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	29,975,000	29,975,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0	163,875,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(38,052,032,548)	(33,754,890,779)
Jumlah Aset Tetap		**243,145,160,144**	**247,606,176,913**
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.4.1.	208,758,183	258,758,183
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.2.	(1,043,791)	(1,293,791)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	C.4.3.	207,714,392	257,464,392
Jumlah Piutanng Jangka Panjang		**207,714,392**	**257,464,392**
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.5.1.	265.770.528	265.770.528
Aset Lain-lain	C.5.2.	835.998.193	835.998.193
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.5.3.	(918,858,641)	(905,829,545)
Jumlah Aset Lainnya		**182,910,080**	**195,939,176**
Jumlah Aset		**244,114,842,991**	**248,087,850,481**
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**0,00**	**0,00**
Jumlah Kewajiban		**0,00**	**0,00**
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	244,114,842,991	248,087,850,481
Jumlah Ekuitas		**244,114,842,991**	**248,087,850,481**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**244,114,842,991**	**248,087,850,481**

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPSIP SUMATERA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	204,692,906	170,405,010
JUMLAH PENDAPATAN		**204,692,906**	**170,405,010**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4,790,081,581	4,347,492,791
Beban Persediaan	D.3.	6,400,000	534,054,900
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3,405,177,836	2,541,898,628
Beban Pemeliharaan	D.5.	966,020,062	575,550,206
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	973,577,580	998,019,339
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0	2,400,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	4,310,170,865	4,995,800,504
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	156,625	1,293,791
JUMLAH BEBAN		**14,451,584,549**	**13,983,360,159**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(14,246,891,643)**	**(13,812,955,149)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset	D.8.	163,875,000	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	123,055,500	489,474,691
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(40,819,500)**	**489,474,691**
SURPLUS/DEFISIT – LO		**(14,287,711,143)**	**(13,336,630,458)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPSIP SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	248,087,850,481	253,078,718,392
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(14,287,711,143)	(13,336,630,458)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	468,920,000	(314,096,799)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.		
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0	(314,096,799)
Lain-lain	E.3.3.	468,920,000	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9,845,783,653	8,659,859,346
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(3,973,007,490)	(4,990,867,911)
EKUITAS AKHIR	**E.6.**	**244,114,842,991**	**248,087,850,481**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Sumatera Utara

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana Strategis BPSIP Sumatera Utara merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. BPSIP Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program untuk periode ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/preferensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah.

2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian.

3. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.

5. Meningkatkan efektivitas manajemen institusi.

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BPSIP Sumatera Utara pada periode ini yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;

2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;

4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Visi Kementerian Pertanian

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian Pertanian

Untuk mencapai visi yang dicapai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Adapun tujuan BPSIP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring kegiatan pengkajian dan diseminasi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPSIP Sumatera Utara dalam menjalankan Tupoksinya.
3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan pertanian wilayah.

Sasaran utama BPSIP Sumatera Utara tahun 2020-2024 adalah dihasilkannya inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di Provinsi Sumatera Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP Sumatera Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPSIP Sumatera Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	401,554,000	217,807,000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13,200,000	13,200,000
Jumlah Pendapatan	**414,754,000**	**231,007,000**
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,835,517,000	4,631,329,000
Belanja Lembur	193,200,000	197,388,000
Belanja Barang Operasional	1,545,300,000	1,575,420,000
Belanja Barang Non Operasional	1,462,485,000	1,535,890,000
Belanja Barang Persediaan	0	7,412,000
Belanja Jasa	678,900,000	538,454,000
Belanja Pemeliharaan	766,176,000	966,052,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	990,600,000	1,171,300,000
Belanja Barang BLU	70,000,000	0
Jumlah Belanja	**10,542,178,000**	**10,623,245,000**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggaran Dipa awal adalah Rp10,542,178,000, setelah dilakukan Revisi DIPA yang ke-15 menjadi Rp10,623,245,000. Maka terdapat penambahan anggaran senilai Rp81,067,000.

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp296,423,406 atau mencapai 128,32% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp231,007,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
Akun Pendapatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	138,636,000	0
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	231,007,000	66,056,906	28,60
Pendapatan Lain-Lain	0,00	41,730,500	0
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	0	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	0,00	50,000,000	0,00
Pendapatan Denda	0,00	0	0,00
Jumlah	**231,007,000**	**296,423,406**	**128,32**

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,14% dibandingkan TA 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	138,636,000	106,530,000	30.14
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	66,056,906	5,412,936	1120.35
Pendapatan Lain-Lain	41,730,500	39,296,508	6.19
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	54,370,000	-100.00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	50,000,000	50,000,000	0.00
Pendapatan Denda	0	4,092,074	-100.00
Jumlah	**296,423,406**	**259,701,518**	**14.14**

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp10,142,207,059 atau 95,47% dari anggaran belanja sebesar Rp10,623,245,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2022

Uraian	2024		
Akun Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Belanja Pegawai	4,828,717,000	4,790,082,889	99,20
Belanja Barang	5,794,528,000	5,352,125,478	92,37
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	**4,790,082,889**	**10,142,208,367**	**95,47**
Pengembalian Belanja	**5,352,125,478**	**(1,308)**	**0.00**
Total Belanja	**10,623,245,000**	**10,142,207,059**	**95.47**

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,71% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 10,18% dikarenakan adanya kenaikan gaji berkala dan pangkat;
2. Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 19,95% dikarenakan adanya penambahan kegiatan pendampingan mendukung kegiatan strategis Kementerian Pertanian;
3. Belanja modal mengalami penurunan sebesar (100)% dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada kegiatan pengadaan belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Belanja Pegawai	4,790,081,581	4,347,492,791	10.18
Belanja Barang	5,352,125,478	4,462,068,073	19.95
Belanja Modal	0	110,000,000	(100.00)
Total Belanja	**10,142,207,059**	**8,919,560,864**	**13.71**

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4,790,081,581 dan Rp4,347,492,791. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,18% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 10,18% dikarenakan adanya kenaikan gaji berkala dan pangkat.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,592,768,889	4,347,493,409	5.64
Belanja Lembur	197,314,000	0	0
Jumlah Belanja Kotor	**4,790,082,889**	**4,347,493,409**	**10.18**
Pengembalian Belanja Pegawai	**-1,308**	**-618**	**111.65**
Jumlah Belanja	**4,790,081,581**	**4,347,492,791**	**10.18**

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,352,125,478 dan Rp4,462,068,073. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 19,95% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 19,95% dikarenakan adanya penambahan kegiatan pendampingan mendukung kegiatan strategis Kementerian Pertanian.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,574,609,653	1,196,473,800	31.60
Belanja Barang Non Operasional	1,323,947,330	811,712,000	63.11
Belanja Barang Persediaan	7,350,000	355,791,900	-97.93
Belanja Jasa	506,620,853	533,712,828	-5.08
Belanja Pemeliharaan	966,020,062	566,358,206	70.57
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	973,577,580	998,019,339	-2.45

Jumlah Belanja Kotor	**5,352,125,478**	**4,462,068,073**	**19.95**
Pengembalian Belanja Barang	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Jumlah Belanja	**5,352,125,478**	**4,462,068,073**	**19.95**

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp110,000,000. Realisasi belanja modal TA 2024 adalah Nihil.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 202 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	110,000,000	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**110,000,000**	0
Pengembalian Belanja Modal	**0**	**0**	-
Jumlah Belanja	**0**	**110,000,000**	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak (netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp80,918,375 dan Rp0, yang sebelumnya tidak ada pada tahun 2023.

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp498.140.000 dan Rp28,270,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	950,000	0
Suku Cadang	5,520,000	5,520,000
Bahan Baku	0	9,600,000
Persediaan Lainnya	0	13,150,000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	491,670,000	0
Jumlah	**498,140,000**	**28,270,000**

Barang konsumsi senilai Rp950,000 merupakan barang habis pakai berupa kertas HVS, map dll. Suku cadang pada persediaan senilai Rp5,520,000 merupakan bahan persediaan yang ada di Laboratorium (alat pecah belah). Sementara pada Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat yang nilainya Rp491,670,000 merupakan stok gudang benih sumber padi yang ada di KP Pasar Miring senilai Rp485.600,000 dan stok ayam KUB senilai Rp6,070,000.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp185,776,503,000 dan Rp185.581.503.000.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**185,776,503,000**
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Saldo per 31 Desember 2024	**185,776,503,000**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**185,776,503,000**

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24,468,450,464 dan Rp24,324,850,464.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**24,468,450,464**
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Perolehan Lainnya	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	**24,468,450,464**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(20,774,341,737)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**3,694,108,727**

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp61,721,073,685 dan Rp61,721,073,685. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**61,721,073,685**
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Perolehan Lainnya	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	**61,721,073,685**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(14,675,489,975)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**47,045,583,710**

C.2.4. Jalan dan Jembatan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6,804,734,796 dan Rp6,804,734,796. Mutasi nilai Jalan dan Jembatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**6,804,734,796**
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pembelian	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2024	**6,804,734,796**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(2,042,174,950)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**4,762,559,846**

C.2.5. Irigasi

Nilai Aset Irigasi yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,715,255,747 dan Rp1,715,255,747. Mutasi nilai Irigasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**1,715,255,747**
Mutasi Tambah	

Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
Saldo per 31 Desember 2024	**1,715,255,747**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(410,937,138)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**1,304,318,609**

C.2.6. Jaringan

Nilai Aset Jaringan yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp681,200,000 dan Rp681,200,000. Mutasi nilai Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**681,200,000**
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	**681,200,000**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(149,088,748)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**532,111,252**

C.2.7. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp29.975.000,00 dan Rp29.975.000,00.

C.2.8. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp163,875,000. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pada tahun 2024 telah dilakukan penghapusan KDP dengan rincian adalah: 1) Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Ayam Strata 1 di IP2TP Gurgur senilai Rp64.875.000 dan 2) Konsultan Perencana Mendukung Keg. TSP di IP2TP Gurgur senilai Rp99.000.000. Kontruksi Dalam Penerjaan merupakan nilai Konsultan Perencana (Gambar), sementara pelaksanaan fisik bangunan tidak bisa dilaksanakan karena terjadi refocusing anggaran.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**163,875,000**
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
Pengembangan KDP	0
Perolehan/Penambahan KDP	0
Mutasi Kurang	
Pengembangan Melalui KDP	0
Penghapusan/Penghentian KDP	(163,875,000)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Saldo per 31 Desember 2024	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**0**

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(38,052,032,548) dan Rp(33,754,890,779).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	24,468,450,464	(20,774,341,737)	**3,694,108,727**
2.	Gedung dan Bangunan	61,721,073,685	(14,675,489,975)	**47,045,583,710**
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,201,190,543	(2,602,200,836)	**6,598,989,707**
4.	Aset Tetap Lainnya	29,975,000	0	**29,975,000**
Akumulasi Penyusutan		**95,420,689,692**	**(38,052,032,548)**	**57,368,657,144**

C.4. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.4.1. Piutang Jangka Panjang lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp208,758,183 dan Rp258,758,183. Piutang Jangka Panjang lainnya merupakan Tuntutan Ganti Rugi pihak ketiga atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Perbenihan Hortikultura pada BPTP Sumatera Utara di Kebun Gurgur. Nilai awal piutangnya adalah Rp308.758.183 dan telah dua kali disetor yaitu: 1) Sejumlah Rp50.000.000 dengan nomor NTPN: 018B10N9VRO2CFEU pada tanggal 14 November 2023; 2) sejumlah Rp50.000.000 dengan NTPN 2565E0NA0558HH0K pada tanggal 19 Desember 2024, sehingga sisa piutang jangka panjang adalah Rp208,758,183.

C.4.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(1,043,791) dan Rp(1,293,791). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau pihak ketiga.

Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Saldo Nilai Piutang per 31 Desember 2023	**(1,293,791)**
Mutasi Tambah	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	250,000
Mutasi Kurang	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
Saldo per 31 Desember 2024	**(1,043,791))**

C.5. ASET LAINNYA

C.5.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp265.770.528,00 dan Rp265.770.528,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	5.650.000,00

Software	260.120.528,00
Jumlah	**265.770.528,00**

Aset Tak Berwujud berupa software senilai Rp260.120.528 untuk tahun 2024 masih dalam proses pengajuan penghapusan.

C.5.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp835.998.193,00 dan Rp835.998.193,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSIP Sumatera Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat terdiri dari 14 NUP senilai Rp64.114.000

C.5.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(918,858,641)) dan Rp(905,829,545)).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	265,770,528	(265,770,528)	0
2.	Aset Lain-lain	835,998,193	(653,088,113)	182,910,080
Akumulasi Penyusutan		**1,101,768,721**	**(905,829,545)**	**182,910,080**

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp244,114,842,991 dan Rp248,087,850,481. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp170,405,010 dan Rp539,598,926. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	54,370,000	-100.00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	138,636,000	106,530,000	30.14
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	66,056,906	5,412,936	1120.35
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,092,074	-100.00
Jumlah	**204,692,906**	**170,405,010**	**20.12**

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4,347,492,791 dan Rp6,690,885,545. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,275,817,700	3,027,811,440	8.19
Beban Pembulatan Gaji PNS	48,698	43,405	12.19
Beban Tunj. Anak PNS	69,418,032	65,091,854	6.65
Beban Tunj. Beras PNS	166,029,540	165,780,000	0.15

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Fungsional PNS	255,910,000	298,725,000	-14.33
Beban Tunj. PPh PNS	32,089,711	14,694,342	118.38
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	0.00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	233,893,900	203,736,750	14.80
Beban Tunjangan Umum PNS	78,960,000	83,475,000	-5.41
Beban Uang Lembur	197,314,000	0	#DIV/0!
Beban Uang Makan PNS	455,400,000	462,935,000	-1.63
Jumlah	**4,790,081,581**	**4,347,492,791**	**10.18**

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6,400,000 dan Rp534,054,900. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	6,400,000	300,421,900	-97.87
Beban Persediaan bahan baku	0	216,133,000	-100.00
Beban Persediaan Lainnya	0	17,500,000	-100.00
Jumlah	**6,400,000**	**534,054,900**	**-98.80**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,405,177,836 dan Rp2,541,898,628. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	983,388,330	554,392,000	77.38
Beban Barang Non Operasional Lainnya	340,559,000	256,320,000	32.86
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,561,000	122,160,000	-49.61
Beban Honor Output Kegiatan	0	1,000,000	-100.00
Beban Barang Operasional Lainnya	412,767,100	245,994,800	67.80
Beban Jasa Lainnya	9,986,000	0	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	50,650,000	45,590,000	11.10
Beban Keperluan Perkantoran	1,079,764,845	785,495,000	37.46
Beban Langganan Air	19,455,540	15,187,885	28.10
Beban Langganan Listrik	314,399,485	315,004,216	-0.19
Beban Langganan Telepon	77,921,078	79,989,324	-2.59
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	20,516,708	42,824,000	-52.09
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	49,941,403	-100.00
Beban Sewa	34,208,750	28,000,000	22.17
Jumlah	**3,405,177,836**	**2,541,898,628**	**33.96**

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp966,020,062 dan Rp575,550,206. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	538,364,900	258,999,200	107.86

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	427,655,162	307,359,006	39.14
Beban Persediaan suku cadang	0	2,480,000	-100.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	6,712,000	-100.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	**966,020,062**	**575,550,206**	**67.84**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp973,577,580 dan Rp998,019,339. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	818,477,580	842,106,967	-2.81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	155,100,000	50,000,000	210.20
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	105,912,372	-100.00
Jumlah	**973,577,580**	**998,019,339**	**-2.45**

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4,310,170,865 dan Rp4,995,800,504. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,992,566,878	1,992,566,872	0.00
Beban Penyusutan Irigasi	56,916,432	56,916,431	0.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	644,072,450	644,072,450	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	50,519,166	50,519,166	0.00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	13,029,096	13,029,096	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,553,066,843	2,238,696,489	-30.63
Jumlah	**4,310,170,865**	**4,995,800,504**	**-13.72**

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-163,875,000	13,150,000	-1346.20
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		128,270,000	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	91325000	2	4566249900.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	308,758,183	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	39,296,506	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	31,730,500	0	#DIV/0!
Jumlah	**-40,819,500**	**489,474,691**	**-108.34**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 01 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp248,087,850,481 dan Rp253,078,718,392.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(14,287,711,143) dan Rp(13,336,630,458). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp468,920,000 dan Rp(314,096,799).

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(314,096,799). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9,845,783,653 dan Rp8,659,859,346. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	10,142,207,059

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Diterima dari Entitas Lain	(296,423,406)
Jumlah	**9,845,783,653**

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp(296,423,406) sedangkan DKEL sebesar Rp10,142,207,059.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Nihil.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp244,114,842,991 dan Rp248,087,850,481.

Penjelasan Lain-lain

1) Aset dan Ekuitas Menurun: Penurunan total aset dan ekuitas sebesar 1,60%, terutama akibat depresiasi aset tetap dan penghapusan konstruksi dalam pengerjaan.

2) Peningkatan Aset Lancar: Persediaan meningkat tajam, menunjukkan peningkatan stok barang berupa stok benih padi dan ayam KUB.

3) Pendapatan dan Beban: Pendapatan utama berasal dari hasil pertanian dan sertifikasi, sedangkan pengeluaran terbesar ada pada gaji pegawai dan penyusutan aset.